

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Karakteristik Entitas Nonlaba

2.1.1 Pengertian Entitas Nonlaba

Entitas nonlaba merupakan suatu entitas yang dalam menjalankan operasinya tidak memiliki tujuan utama dalam hal mencari laba atau keuntungan, melainkan berupa tujuan nonkomersial, tidak berfokus pada sesuatu hal yang bersifat mencari laba atau keuntungan. Entitas nonlaba mempunyai visi dan misi yang berfokus pada penyediaan pelayanan bagi masyarakat, seperti organisasi sosial, organisasi keagamaan, yayasan pendidikan, dan lain sebagainya.

Pada umumnya, sumber daya entitas nonlaba berasal dari para donatur atau sumbangan para anggota secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan. Namun dalam hal ini, entitas nonlaba tetap perlu untuk menyusun laporan keuangannya untuk mempertanggungjawabkan atas seluruh sumber daya atau dana yang telah diberikan oleh para donatur dan pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa bentuk dari entitas nonlaba yang berkembang di masyarakat yaitu yayasan, masjid, koperasi, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya.

2.1.2 Karakteristik Entitas Nonlaba

Entitas nonlaba tentu memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan entitas yang berorientasi pada laba. Ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi sebagai sebuah entitas nonlaba adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh sumber daya yang dimiliki oleh entitas nonlaba berasal dari para donatur yang memberikan sumbangan atau dana tersebut secara sukarela dan tidak diharapkan untuk diberi imbalan.
- b. Memproduksi barang atau jasa tanpa bertujuan mencari keuntungan.
- c. Tidak terdapat kepemilikan yang lazim artinya pihak manapun tidak dapat menjual, mentransfer, atau membeli kembali kepemilikan dalam entitas nonlaba.

Berdasarkan karakteristik di atas, entitas nonlaba memiliki perbedaan dengan entitas yang berorientasi laba. Perbedaan yang utama antara entitas nonlaba dengan entitas berorientasi laba adalah pada tujuan yang ingin dicapai dan sistem kepemilikan dalam entitas. Dengan demikian, berbagai informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nonlaba dengan entitas berorientasi laba terdapat perbedaan.

2.2 Pengertian Yayasan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2001, yayasan merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan memiliki tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan mempunyai kekayaan yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan

berupa uang atau barang. Selain itu, adapun beberapa sumber perolehan kekayaan yayasan antara lain sumbangan, hibah, wakaf, dan perolehan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yayasan dan perkumpulan memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar yaitu yayasan memiliki definisi dan batasan yang lebih sempit sedangkan perkumpulan memiliki definisi dan batasan yang lebih luas. Adapun dua jenis perkumpulan adalah sebagai berikut:

1. Perkumpulan berbentuk badan hukum, seperti Yayasan.
2. Perkumpulan tidak berbentuk badan hukum, seperti Firma.

Dari penjabaran di atas, yayasan termasuk dalam perkumpulan yang berbentuk badan hukum sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Tabel 2.1 Perbedaan antara Perkumpulan dan Yayasan

Perkumpulan	Yayasan
1. Berbasis anggota	1. Tidak berbasis anggota
2. Bersifat komersial	2. Bersifat nonkomersial
3. Bisa berbadan hukum dan tidak berbadan hukum	3. Berbadan hukum

Dari tabel perbedaan antara perkumpulan dan yayasan, dapat disimpulkan bahwa yayasan memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat daripada perkumpulan yang tidak berbadan hukum.

Pada umumnya, di dalam yayasan terdapat struktur organisasi atau biasa disebut dengan istilah organ yayasan. Ketiga organ yayasan tersebut yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Namun tidak ada distribusi atas dana yang diperoleh dari kegiatan utama entitas kepada ketiga pihak tersebut. Organ yayasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pembina

Pembina adalah orang perseorangan yang dapat mengarahkan yayasan untuk dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembina juga yang memegang kewenangan untuk menyetujui program kerja yayasan dan rencana anggaran tahunan serta mengadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja dan sumber daya yang dimiliki yayasan tahun sebelumnya.

b. Pengurus

Pengurus adalah pihak yang melaksanakan tugas dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengurus dipilih oleh pembina berdasarkan pada hasil keputusan dalam rapat. Seorang pengurus tidak boleh mempunyai dua jabatan yaitu sebagai pembina atau pengawas. Pengurus yayasan memiliki kewajiban dalam hal menyusun laporan keuangan yayasan dalam suatu periode tertentu.

c. Pengawas

Pengawas adalah pihak yayasan yang bertugas untuk mengawasi serta memberikan nasihat dan pertimbangan kepada pengurus atas pelaksanaan kewenangannya dalam hal kepengurusan yayasan. Dalam hal ini, seorang pengawas juga tidak dapat menjadi pembina dan pengurus sekaligus. Pembina

sebelumnya telah menyelenggarakan pertemuan untuk memilih dan mengangkat seorang pengawas yayasan. Seorang pengawas harus memiliki sikap tanggung jawab yang penuh terhadap tugasnya yang berkaitan dengan yayasan. Kewenangan pengawas salah satunya yaitu dapat memberhentikan sementara anggota pengurus apabila didukung dengan alasan dan terdapat bukti yang kuat atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pengurus yayasan tersebut.

2.3 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah alat utama yang dimanfaatkan oleh entitas untuk memperlihatkan kondisi keuangan dan mengkomunikasikan hasil kinerja atau pencapaiannya kepada para pemangku kepentingan. Informasi keuangan tersebut disajikan dalam bentuk nominal uang. Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi keuangan atau mengenai seluruh sumber daya yang dimiliki entitas dan kegiatan yang dilakukan atas sumber daya tersebut kepada para pemangku kepentingan terutama pihak luar.

Laporan keuangan ini juga menjadi acuan bagaimana kinerja suatu entitas atau organisasi dalam satu periode. Dengan adanya laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas maka dapat digunakan untuk proses evaluasi yang merupakan bagian penting dalam menilai baik buruknya kinerja suatu entitas atau organisasi dalam satu periode. Pada umumnya, laporan keuangan digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam hal ini bertujuan agar pihak-pihak tersebut dapat mengambil keputusan dengan tepat

sehingga entitas dapat terus mendapatkan sumber daya untuk menjalankan kegiatan operasionalnya yang didanai oleh para penyumbang atau pemberi sumber daya tersebut.

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018) menjelaskan bahwa tujuan dari adanya laporan keuangan lebih luas lagi. Laporan keuangan ini diharuskan untuk dapat memenuhi berbagai kepentingan para pihak yang terkait misalnya manajemen, karyawan, kreditur, investor, pemerintah, dan lainnya. Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan entitas yang berguna dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut PSAK 1, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna bagi para pihak yang terkait yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan secara tepat. Secara rinci dijelaskan pada Wardhana (2014) tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai yaitu:

- 1) jumlah dan sifat aset, kewajiban, dan ekuitas entitas;
- 2) pengaruh transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi jumlah dan sifat ekuitas;
- 3) jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya;
- 4) cara suatu entitas memperoleh dan mengeluarkan kas, mengelola pinjamannya dan mengelola tingkat likuiditasnya; dan
- 5) pendapatan jasa entitas.

2.4 Laporan Keuangan Entitas Nonlaba Berdasarkan ISAK 35

Tujuan utama dari laporan keuangan bagi entitas nonlaba adalah untuk menyajikan berbagai informasi keuangan yang akuntabel dan andal agar kegunaan dan kepentingan para pihak yang terkait dalam penyediaan sumber daya entitas terpenuhi. Para pihak pengguna laporan keuangan entitas nonlaba mempunyai kewenangan dan berbagai macam kepentingan dalam menilai kinerja suatu entitas (IAI, 2018). Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan seluruh sumber daya yang diberikan oleh para penyumbang atau donatur maka entitas harus menyusun sebuah laporan keuangan. Format laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku pada entitas nonlaba. Laporan keuangan harus dibuat sebaik mungkin, relevan, andal, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan dalam ISAK Nomor 35. Dalam ISAK 35 laporan keuangan suatu entitas nonlaba meliputi:

2.4.1 Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan atau neraca adalah bentuk laporan yang memberikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan kekayaan bersih entitas selama periode waktu tertentu. Tujuan dari laporan keuangan ini adalah untuk memenuhi kemampuan penyedia sumber daya, anggota organisasi, pemberi pinjaman, donatur, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan operasi intinya secara berkelanjutan, serta komitmen dan kebutuhan pendanaan secara eksternal. Ada tiga elemen utama dalam membuat neraca, berkaitan dengan elemen-elemen tersebut yang didefinisikan adalah sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya yang dikelola entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu dan diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan.
- b. Liabilitas adalah kewajiban yang timbul dari transaksi masa lalu dan penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi kepada pihak lain.
- c. Ekuitas adalah hak residual dari suatu aset setelah dikurangi semua kewajibannya.

2.4.2 Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan perubahan aset neto dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang dampak dari adanya transaksi atau peristiwa lain yang dapat mengubah jumlah kekayaan bersih yang terjadi di suatu entitas nonlaba. Pada laporan perubahan aset neto menunjukkan kelebihan dan kekurangan kekayaan bersih selama periode waktu tertentu. Terdapat dua kelompok aset neto dalam laporan perubahan aset neto yaitu aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan yang didefinisikan adalah sebagai berikut:

- a. Aset neto tanpa pembatasan

Aset neto tanpa pembatasan adalah aset neto yang dalam perolehannya tidak ada jangka waktu dan peruntukkan yang jelas sehingga dalam penggunaannya tidak ada batasannya.

- b. Aset neto dengan pembatasan

Aset neto dengan pembatasan adalah aset neto yang dalam perolehannya terdapat pernyataan secara jelas mengenai jangka waktu dan peruntukannya sehingga penggunaannya pun terbatas.

2.4.3 Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan penghasilan komprehensif bertujuan memberikan informasi mengenai jumlah kelebihan atau kekurangan serta penghasilan komprehensif lain dalam suatu periode tertentu. Laporan penghasilan komprehensif ini membantu para penyedia sumber daya, anggota organisasi, pemberi pinjaman, donatur, dan para pemangku kepentingan lainnya yaitu:

- a. mengukur kestabilan dan kesinambungan entitas nonlaba dalam menjalankan kegiatan utamanya;
- b. menilai kinerja dan pelaksanaan tanggung jawab oleh para pihak internal entitas nonlaba; dan
- c. mengevaluasi kinerja entitas nonlaba selama periode waktu tertentu.

2.4.4 Laporan Arus Kas

Pada prinsipnya, entitas menggunakan basis akrual dalam pencatatan akuntansinya, namun arus kas juga penting untuk mempengaruhi pengambilan keputusan entitas, dan arus kas masuk dan kas keluar perlu dilaporkan. Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode waktu tertentu. Laporan arus kas mengklasifikasikan sumber arus kas masuk dan arus kas keluar secara terpisah menjadi tiga kelompok yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

A. Aktivitas Operasi

Pada aktivitas operasi, arus kas masuk dan kas keluar bersumber dari kegiatan utama atau operasional entitas. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi entitas nonlaba yaitu:

- a. menerima kas dari donatur;
- b. menerima kas dari hasil memberikan jasa;
- c. membayar kas kepada pemasok; dan
- d. membayar beban operasional.

B. Aktivitas Investasi

Pada aktivitas investasi ini berkaitan dengan aktivitas perolehan dan penjualan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Contoh arus kas dari aktivitas investasi yaitu:

- a. menerima kas dari hasil penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset tetap lainnya;
- b. membayar kas atas perolehan properti, pabrik, dan peralatan, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain.

C. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan ini berkaitan dengan sumber perolehan pendanaan suatu entitas. Contoh arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu:

- a. menerima kas dari penerimaan saham atau produk ekuitas lainnya;
- b. menerima kas dari penerbitan obligasi;
- c. membayar kas untuk melunasi pinjaman; dan
- d. membayar kas untuk perolehan saham entitas.

2.4.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan mengenai uraian rinci atas akun-akun atau hal-hal yang telah dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk mengungkapkan seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu diketahui oleh pembaca laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan memuat dasar informasi penyusunan laporan keuangan dan harus menjelaskan metode akuntansi yang digunakan oleh entitas.

2.5 Perubahan PSAK 45 Menjadi ISAK 35

Pada awalnya laporan yang terstruktur diatur dalam PSAK 45 Tahun 2011, ini berfungsi sebagai panduan untuk membuat laporan keuangan yang relevan, andal, dan akuntabel. Namun pada 1 Januari 2020 diberlakukan secara efektif ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menggantikan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba melalui Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSK) Nomor 13. Implementasian ISAK 35 diharapkan dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan yang relevan dan lengkap sesuai dengan standar akuntansi sehingga seluruh pengguna laporan keuangan dapat memahami laporan keuangan tersebut.

ISAK 35 dapat digunakan sebagai pedoman untuk melihat laporan keuangan entitas dengan menggunakan SAK ETAP. Dalam ISAK 35 hanya mengatur tentang penyajian laporan keuangannya, sehingga mengenai kebijakan

akuntansi lainnya dapat mengacu pada SAK atau SAK ETAP disesuaikan dengan tingkat relevansi dalam suatu entitas.